

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar belakang masalah

Rusia merupakan salah satu pecahan negara Uni Soviet dan akibat pewarisan dari negara terdahulu yang mempunyai perkembangan teknologi, militer dan ekonomi yang memadai dan menimbulkan hubungan kerjasama yang terjalin antara Rusia dan China, kerjasama Rusia dengan China dimulai pada abad ke 20 hingga awal abad ke 21 dan saat itu memang China sedang membutuhkan peningkatan militer melalui pengadaan senjata terkait perlombaan senjata dengan Taiwan dan Asia Tenggara maka di jalin kerjasama antara Rusia dengan China dalam bidang militer. (Arneed 1998 hlm 55)

Pada tahun 1992 terjadinya sebuah kerjasama antara Rusia dengan China ketika presiden Rusia, Boris Yeltsin mengadakan kunjungan ke Beijing untuk menyetujui tawaran Rusia menjalin kerjasama *military – technical cooperation*, kerjasama ini menjadi semakin menantang antara kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral menjadi *constructive partnership* pada bulan September 1994 dan *strategic partnership* pada bulan April 1996 sebelum menandatangani perjanjian persahabatan China Russia *Treaty of Good-Neighborliness, friendship and cooperation* pada bulan Juli 2001 di Moskow, Rusia. (Blank, 39 1997) Kedua aktor yang berperan dalam kerjasama ini melakukan latihan angkatan laut gabungan latihan tersebut terjadi pada saat peningkatan kekuatan maritime China. Empat kapal China akan berpartisipasi, bersamadengan dua frigat dan kapal pasokan, sementara Rusia akan mengirimkan 11 kapal, satu kapal selam dan tiga pesawat. (Vitaly, 2007 hlm 9)

China menjalin hubungan dalam bidang ekspor persenjataan militer dengan Rusia untuk memperkuat modernisasi kemiliteran dan untuk perkembangan ekonomi yang berarti bagi Rusia. Jenis persenjataan yang terlibat dalam transfer

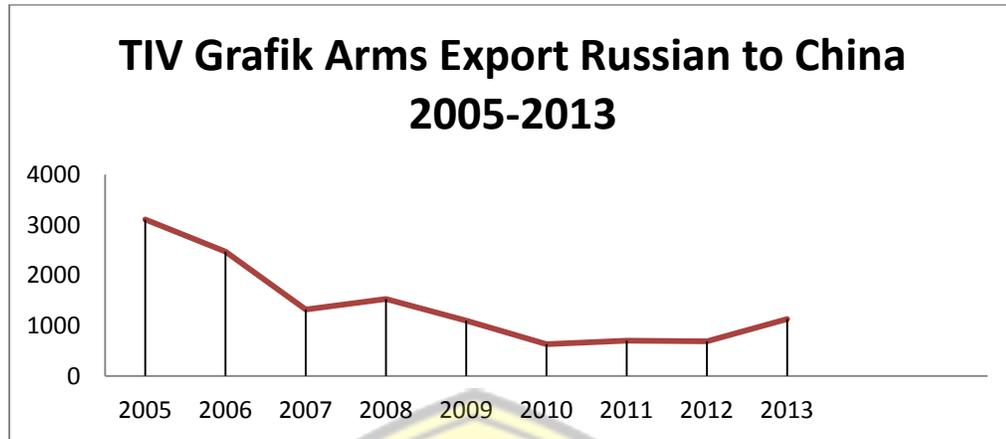
senjata antara Rusia dengan China merupakan senjata konvensional utama / *major conventional weapons* (MCW) yang meliputi pesawat, sistem pertahanan udara, senjata anti-kapal selam, kendaraan lapis baja, artileri, mesin, rudal, sensor, satelit dan kapal. Ini tidak menyentuh senjata kecil dan senjata ringan / *small arms and light weapons* SALW. (Isabelle, 2012 hlm 9)

Perkembangan kekuatan militer Rusia terus bertambah dengan banyaknya pasukan militer Rusia yang mencapai 79.982 dan mempunyai tank perang sebanyak 22.800 buah di tambah dengan rudal S-500 merupakan sistem rudal pertahanan udara Rusia yang didisain untuk menyergap *Inter Continental Ballistic Missile* (ICBM), Pertahanan terhadap *Airborne Early Warning and Control* (AEW&C) dan Jamming pesawat, G-29M dan MiG-29M2 adalah pesawat tempur mampu terbang dengan kekuatan dan kecepatan 2,25 *Mach* (2.756 km/jam). (<http://jakartagreater.com/sistem-pertahanan-rudal-s-500-rusia> 23 juni 2015 jam 08:21pm). Rusia juga terus mengembangkan persenjataan militer yang sangat canggih karena teknologinya yang begitu modern. Untuk memperkuat hubungan negara kawasan ,Rusia melakukan kerjasama dengan negara di dunia atau kawasan. Rusia merupakan salah satu supplier terbesar negara China setelah India.

Pada tahun 2005 puncaknya kerjasama militer antar Rusia dengan China meningkat dimana pada tahun 2005, Rusia kembali mensuplai peralatan militer kepada China dengan menjual 24 pesawat tempur SU-27S. Ekspor pesawat tempur ke China ini memberikan keuntungan sebesar 1,2 milyar dollar, dimana suplai pesawat ke China terus berlanjut dengan kesepakatan China membeli 50 pesawat tempur SU-27s dalam lima tahun selanjutnya, serta lisensi produksi dibawah perusahaan China sebanyak 50-200 pesawat tempur. Tetapi setelah adanya peningkatakan kerjasama pada tahun 2006 terjadinya penurunan yang sangat drastis. (Blank, 1997 hlm 39) Penurunan yang terjadi pada ekspor senjata Rusia ke ini tentu bukan tanpa sebab. Penurunan ekspor terjadi karena situasi yang telah berubah dalam industri prtahanan China, yang mana industri pertahanan China saat ini telah mampu memproduksi persenjataan militer secara lebih mandiri. Hal ini

juga tidak terlepas dari ekspor senjata serta transfer teknologi militer dan lisensi yang dikirim Rusia ke China. Jika sebelumnya China hanya mampu memproduksi pesawat tempur SU-27 dibawah lisesnsi Rusia, kini industri militernya telah berkembang pesat dan mampu memproduksi peralatan militer dalam berbagai /desain dan teknologi secara mandiri. (Weith, 2008 hlm 20)

Beberapa perusahaan Rusia yang mengetahui taktik *reverse engineering* China, menghentikan sementara dan melakukan penolakan terhadap China. Pada 2010, beberapa perusahaan seperti Sukhoi dan MIG mulai menolak penjualan mesin jet RD-93 ke China dengan alasan akan mengancam pemasaran jet tempur buatan mereka. Beberapa pihak hingga saat ini terus meminta pemerintah Rusia untuk mempertimbangkan keputusan terus menjual senjata dan teknologi militer ke China. bahkan, 56% masyarakat Rusia sejak lama menyatakan tidak lagi percaya pada China yang kerap kali melakukan tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab. (Blank, 1997 hlm 30) Setelah mengetahui tindakan China yang telah melakukan *reverse engineering* teknologi persenjataan Rusia, seharusnya Rusia telah menindak tegas perbuatan China seperti memutuskan hubungan kerjasama dengan China tetapi Rusia tetap menjalin kerjasama dengan China justru meningkatkan kerjasama militer di bidang persenjataan.



Sumber: <http://www.sipri.org/databases/armstransfers/background> 4 mei 2015 jam 05.03pm

**Grafik 1**

Terlihat dengan penjelasan grafik diatas bahwa kerjasama militer Rusia dengan China setelah terjadinya reverse engineering pada tahun 2006 yang telah mencopy teknologi pesawat tempur milik Rusia. Tindakan Rusia bukan menghentikan kerjasamatetapi justru Rusia tetap menjalin kerjasama dengan Chinawalapun terjadi penurunan ekspor senjata terlihat mulai tahun 2008-2012 tetapi, pada tahun 2013Rusia meningkatkan kerjasama dengan China dan ditambah sokongan anggaran yang terus di tingkatkan oleh China. kerjasama militer dengan China menjadi hal penting untuk Industri pertahanan Rusia karena China tidak mampu mendapatkan senjata untuk pasukan sendiri dan Rusia membutuhkan bantuan perekonomian yang merosot pasca perang dingin.Kerjasama militer tepatnya dalam bidang ekspor persenjataan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Rusia.Walaupun terjadi pelanggaran China terhadap kesepakatan kerjasama militer dengan Rusia.Namun hingga saat ini pemerintah Rusia terlihat tidak berencana untuk mengambil kebijakan menghentikan hubungan kerjasama militer dengan China

## **I.2 Rumusan masalah**

Dari beberapa data yang penulis peroleh tentang kerjasama militer Rusia dan China dalam bidang ekspor persenjataan militer dimulai sejak perang dingin terjadi,

Rusia membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan China membutuhkan bantuan militer, Pada saat itulah kedua negara ini menjalin kerjasama militer untuk mencapai tujuan masing masing . tetapi pada perjalanan kerjasama China melakukan pelanggaran yaitu *reverse engineering* teknologi persenjataan Rusia tetapi kerjasama terus berjalan walapun terjadinya penurunan tingkat ekspor senjata, tetapi terlihat pada tahun 2013 terjadinya peningkatan ekspor senjata dan Melihat penjelasan table grafik saya sebagai peneliti tertarik untuk di jadikan sebuah pertanyaan penelitian yaitu . **Faktor apa saja yang melatarbelakangi Rusia meningkatkan kerjasama dengan China pasca *reverse engineering* pada tahun 2013 ?**

### **I.3 Tujuan penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu:

- A. Menjelaskan mengenai kerjasama keamanan yang dilakukan oleh kedua negara yaitu rusia dengan china dalam mengembangkan persenjataan yang dilakukan china
- B. Menganalisa dan menjelaskan faktor faktor apa saja yang memicu kedua negara melakukan kerjasama.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu:

#### **I.4.1 Manfaat Akademis**

Memberikan suatu informasi atau data di dalam ilmu Hubungan Internasional untuk memperkaya wawasan dan informasi mengenai kerjasama keamanan di dunia internasional yang dilakukan oleh negara Rusia dan China.

#### **I.4.2 Manfaat Praktis**

Mengetahui tentang respon dan langkah-langkah yang diambil oleh Rusia dalam kerjasama keamanan dengan China.

#### **I.5 Tinjauan pustaka**

**1.5.1 *China's energy and security relations with Russian Hopes, Frustrations and Uncertainties* Linda Jakobson, Paul Holtom, Dean Knox and Jingchao Peng.**

Dalam buku yang berjudul *China's energy and security relations with Russian* menjelaskan tentang kecenderungan dan factor pendorong kerjasama Rusia dengan China dalam bidang transfer persenjataan .pada chapter 3 tentang *military cooperations* salah satu elemen inti dari hubungan China dan Rusia sejak awal 1990 telah berkerjasama militer. Namun pejabat China dan Rusia menekankan bahwa sementara mereka berada dalam kemitraan strategis dan mereka belum membentuk aliansi militer. Bab ini berfokus pada dimensi kedua dan ketiga, dengan referensi ke pertama. Memperkirakan tingkat dan kualitas kerjasama militer politik adalah sebuah tantangan sedangkan data ada pada pertukaran tingkat tinggi dan kunjungan itu tidak memberikan bukti yang jelas dari kekuatan hubungan itu. bagian pertama dari bab ini grafik latar belakang dan terus batas negosiasi di kerjasama militer teknis Rusia dan China dan bagian kedua menilai kerjasama pelatihan militer China dan Rusia terutama latihan bersama militer Misi Perdamaian tersebut.

Salah satu pilar dari hubungan China dan Rusia sejak akhir perang dingin telah mentransfer senjata utama konvensional / *major conventional weapon* komponen dan teknologi dari Rusia ke China. Antara runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan 2010, telah diperkirakan bahwa lebih dari 90% dari impor senjata konvensional utama China yang disediakan oleh Rusia, sementara China menyumbang hampir 40% dari ekspor Rusia. Selama periode ini China mengimpor dari Rusia Su-27/Su-30 pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter Mi-17 transportasi militer, sistem pertahanan udara Tor-M1 ponsel, sistem pertahanan

udara S-300PMU1 / 2, Type 636E dan Jenis 877E kapal selam , *Sovremenny* perusak dan berbagai rudal. Selain itu, China mendapat persetujuan untuk lisensi produksi Su-27 pesawat tempur, helikopter Mi-17 dan anti-tank dan anti-kapal *missiles*. Pada tahun 2005 telah disorot dalam analisis China dan Rusia sebagai awal dari akhir untuk China pesanan untuk sistem lengkap dari Rusia sebagai tuntutan PLA untuk peralatan Rusia yang puas dan industri senjata China semakin mampu memenuhi tuntutan PLA. Sejak tahun 2007 telah terjadi penurunan penting dalam pengiriman senjata Rusia ke China. (Hopes, 2003 hal 121)

Dalam penjelasan buku ini yang berjudul *China's energy and security relations with Russian* sejalan dalam penjasan dalam skripsi dan analisa yang sayarancang di jelaskan bahwa terjadinya penurunan pada transfer persenjataan Russia ke China pada tahun 2006 hingga 2010 yang diperjelas dalam pemaparan saya, tetapi dalam buku ini kurang menjelaskan apa saja faktor pendorong yang menyebabkan penurunan transfer senjata yang dialami oleh Rusia apa mungkin faktor ekonomi atau militer .dan oleh karena itu penulis mencoba melakukan penelitian apa penyebab/faktor pendorong terjadinya penurunan transfer senjata Rusia ke China dan itu melengkapi dalam penelitian yang sipenulis lakukan. SIPRI Database transfer senjata berisi tentang semua informasi internasional transfer senjata konvensional utama MCW (termasuk penjualan, hadiah dan transfer teknologi) ke negara-negara, organisasi internasional dan kelompok-kelompok non-negara bersenjata, database tidak mencakup transfer internasional senjata api kecil. Database dapat digunakan untuk memantau volume transfer senjata konvensional utama dan mengidentifikasi jumlah dan jenis senjata yang telah dialihkan, dipecah oleh pemasok atau penerima.

### **1.5.2 Arms Transfers between Russia and China Master (Two Years) in Global Studies Spring Term 2012 University Iryna Zhuravel Lund, Department of Political Science Master**

Dalam buku ini Laurence menyatakan bahwa transfer senjata adalah komoditas yang dapat diamati yang diperdagangkan dalam sistem internasional

untuk tujuan meningkatkan kekuatan militer atau kekuatan politik penerima bangsa. Perbedaan utama antara definisi yang diberikan oleh penulis yang berbeda adalah ruang lingkup apa yang disertakan dalam transfer senjata, Transfer senjata dan teknologi merupakan salah satu dimensi terbesar dan paling penting dari kerja sama militer antara China dan Rusia. Namun, ada aspek-aspek lain dari kerjasama yang erat kaitannya dengan transfer senjata. Meskipun aspek-aspek lain seperti konsultasi pada tingkat tinggi militer dan latihan militer bersama tidak mewakili fokus utama dari penelitian ini, adalah penting untuk menguraikan mereka dan hubungannya dengan transfer senjata. (Isabelle, 2012 hlm 5)

Transfer senjata. Istilah agak cukup jelas dan mewakili pengiriman kemampuan militer dari satu negara ke yang lain. Alasan Rusia ekspor senjata ke China sebagaimana telah kita lihat di atas modernisasi militer yang dilakukan oleh Rusia dan China dikombinasikan dengan akses terbatas ke pasar senjata dunia meninggalkan China dengan sedikit alternatif dari mana untuk membeli senjata dan hubungan positif pada tingkat pribadi yang kondusif bagi pemulihan hubungan secara umum dan peningkatan akuisisi senjata dari Rusia pada khususnya. (Isabelle 2012 hlm 6) Namun, pertanyaannya kemudian tetap mengapa Rusia bersedia menjual senjata ke China meskipun ancaman jangka panjang yang disebutkan potensi munculnya tetangga terdekatnya. Saya berpendapat faktor yang mempengaruhi keputusan kepemimpinan Rusia untuk menjual senjata ke China. Kita dapat melihat bahwa penulis memfokuskan mengenai kenapa Rusia meningkatkan kerjasama dengan China padahal China telah melakukan pelanggaran yang telah melakukan *reverse engineering* pesawat tempur dan sistem pertahanan Rusia.

Sedangkan Penulis lain juga mencatat bahwa penjualan senjata menciptakan keuntungan strategis tertentu untuk negara-negara pemasok karena mereka menempatkan negara-negara mengimpor ke beberapa derajat ketergantungan pada pihak luar untuk alat pertahanan nasional dan dapat melayani sejumlah kepentingan strategis pemasok dari mengubah keseimbangan daerah kekuasaan mendukungnya, memberikan sekutu sarana pencegahan, meningkatkan interoperabilitas antara

angkatan bersenjata, mendapatkan akses ke para pemimpin militer dan elit lainnya dalam suatu negara dan mencoba untuk mempengaruhi orientasi politik dari negara penerima.

**1.5.3 “Trends in international arms transfers 2010 SIPRI Fact Sheet March 2011” Paul Holtom, Lucie Béraud-Sudreau, Mark Bromley, Pieter D. Wezeman and Siemon T. Wezeman**

SIPRI Database transfer senjata berisi tentang semua informasi internasional transfer senjata konvensional utama MCW ke negara-negara, organisasi internasional dan kelompok-kelompok non-negara bersenjata. Database dapat digunakan untuk memantau tren dalam volume transfer senjata konvensional utama dan mengidentifikasi jumlah dan jenis senjata yang telah dialihkan, dipecah oleh pemasok atau penerima

Dalam Bab ini menjelaskan lima pemasok terbesar senjata konvensional besar di 2006-2010 adalah Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Prancis dan Inggris (Gambar 2 dan Tabel 1). Amerika Serikat dan Rusia tetap jauh eksportir terbesar, akuntansi untuk 30% dan 23 persen dari seluruh ekspor, masing-masing. Lima besar pemasok menyumbang 75% dari seluruh ekspor senjata konvensional utama di tahun 2006-2010, dibandingkan dengan 80% pada tahun 2001-2005.

Rusia mengekspor sekitar 67% dari senjatanya ke Asia pada 2006-2010 dan 14% ke Afrika. India adalah penerima terbesar dari ekspor senjata Rusia dan pada tahun 2010 memberi sinyal terkuat sampai saat ini bunga terus di produksi kerjasama dengan Rusia transportasi dan pesawat tempur canggih. Meskipun kekhawatiran Rusia dengan china dalam permasalahan menyalin teknologi senjata dan potensi persaingan di pasar senjata internasional, Rusia bersedia untuk menyediakan China dengan sistem pertahanan udara S-400, Il-476 pesawat angkut dan Su-33 pesawat tempur pembawabeban untuk harga yang tepat. Pada tahun 2010 Rusia mengumumkan bahwa mereka tidak akan memasok lima S-300 sistem pertahanan udara ke Iran. Ia masih memiliki pesanan yang luar biasa untuk S-300 sistem untuk Aljazair, Libya, Kazakhstan dan Venezuela. Armenia mengungkapkan

pada tahun 2010 bahwa itu adalah dalam kepemilikan setidaknya dua S-300 sistem dipasok oleh Rusia.(Paul, 2011 hal 6).

Akan tetapi Dalam penjelasan dalam buku **Trends in internasional arms transfers 2010 SIPRI Fact Sheet March 2011** menjelaskan tentang transfer senjata yang dilakukan oleh beberapa negara seperti: Rusia Amerika Serikat, Jerman, Prancis dan Inggris kelima negara tersebut merupakan pemasok beberapa negara di dunia. terutama Rusia yang menempati posisi pertama di dalam transfer senjata ke setiap kawasan di dunia ini, diterusi oleh Amerika, Inggris dan Prancis dalam penjelasan diatas ditemui perbedaan dalam penelitian yang saya lakukan dalam buku tersebut menjelaskan transfer senjata yang dilakukan oleh kelima negara tersebut sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan, Saya hanya membahas negara Rusia saja dan transfer senjata Rusia mempunyai penghalang berat yaitu Amerika yang merupakan negara super power dalam segi pertahanan dapat mengganggu transfer senjata yang dilakukan oleh Rusia misalnya seperti rusia memasuki wilayah Asia Tengah dan Amerika juga melakukan hal yang sama dan itu merupakan ancaman bagi Rusia karena bisa mengganggu dalam kerjasama pertahanan oleh beberapa negara di Asia .

## **I.6 Kerangka pemikiran**

### **I.6.1 Teori Kerjasama /Cooperation**

Kerjasama dapat diadakan dalam berbagai bentuk mulai dari kerangka kerjasama multilateral maupun kerjasama bilateral. Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam hubungan internasional memiliki makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Konsep hubungan bilateral ini digunakan untuk memperkokoh kerjasama antara dua negara dengan menggunakan pengaruhnya sehingga dapat mencapai tujuan nasionalnya. Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa; “Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua Negara”.(Didi, 1993 hal 18).

Pernyataan ini mengandung arti bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua negara.

Penggambaran tentang hubungan bilateral tersebut tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara untuk mengadakan hubungan dan menjalin kerjasama antara kedua negara dan tidak tergantung hanya pada negara yang dekat saja melainkan juga negara yang secara geografis letaknya agak jauh. Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kerjasama politik, sosial, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis di antara kedua negara.

Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi dengan bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat pula diartikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah di sepakati bersama. (Holsti, 1998 hlm 209) Pendapat Holsti di atas memberikan batasan konsepsi yang jelas antara dua bentuk interaksi dalam hubungan internasional, yaitu konflik dan kerjasama. Apabila dalam menghadapi satu kasus atau lebih pihak-pihak yang terlibat gagal mencapai kesepakatan, maka interaksi antar aktor tersebut akan berujung pada konflik. Namun apabila pihak-pihak yang terlibat berhasil mencapai suatu kesepakatan bersama, maka interaksi antar aktor tersebut akan menghasilkan suatu bentuk kerjasama.

Dalam kerjasama antara Rusia dan China ialah termasuk kerjasama bilateral dimana kerjasama ini antara negara dengan negara, setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakanyang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Sebab atas

dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional.(Rudy, 2002 hlm 27). Kebijakan spesifik yang dimaksud dapat berupa kebijakan yang bersifat kerjasama bilateral dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Namun, kebijakan spesifik tersebut juga dapat berupa paksaan yang harus diterima oleh negara lain. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya, serta melindungi kepentingan negaranya.Devetak, George, dan Burke mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut

*“A notoriously plastic term that refers to the state's foreign policy aims. The national interest is said to be the same regardless of the government in power, but different governments will hold different ideological agendas and priorities, meaning that the national interest will change according!”*

Definisi di atas mengartikan kepentingan nasional sebagai sebuah hal yang nyata dimiliki oleh setiap negara dalam berbagai prilakunya dalam hubungan antar bangsa, meskipun dalam implementasinya setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda yang di dasarkan oleh berbagai faktor yang membentuk negara itu baik secara historis, politis, ekonomis dan geografis.Kepentingan nasional sebuah negara dapat berubah mengikuti pada tingkat prioritas atau agenda ideologis pemimpin ataupun pemerintahan negara tersebut.Ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional dapat di pengaruhi oleh banyak faktor dalam sebuah negara.terwujud dari implementasi sebuah kepentingan nasional adalah perumusan sebuah kebijakan yang merupakan kelanjutan dari politik luar negeri negara tersebut.Politik luar negeri tersebut tidak hanya memperhitungkan kondisi dari luar negara tersebut, tetapi juga melihat kondisi dari dalam negerinya.

### I.6.2 Teori Kebijakan Luar Negeri.

Kebijakan luar negeri merupakan serangkaian sasaran bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan militer. Untuk itu aktor-aktor negara melakukan berbagai macam kerjasama baik kerjasama yang bersifat bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Biasanya kebijakan luar negeri ini dapat dilakukan dengan berbagai cara namun terdapat tiga yang paling umum yaitu melalui perang, perdamaian dan kerjasama ekonomi. (Holsti, 1992 hlm 82)

K J Hosti mengeluarkan argumen bahwa kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Terdapat lima landasan pembuatan sumber kebijakan luar negeri, yaitu (Eugene, 2003 hlm 16-19):

- A. *External sources* (sumber eksternal) meliputi atribut yang ada pada sistem internasional dan pada karakteristik serta sikap suatu negara dalam menjalaninya. *external sources* mencakup perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, kebijakan dan tindakan dari negara lain baik itu konflik maupun kerjasama, ancaman, dukungan yang baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi *foreign policy* suatu negara.
- B. *Societal sources* (sumber masyarakat) yaitu seluruh karakteristik sosial domestik dan sistem politik yang membentuk orientasi masyarakat terhadap dunia. Intinya adalah seluruh aspek non pemerintah dari sistem politik yang mempengaruhi *foreign policy*. Hal ini meliputi keadaan geografis, etnis, nilai atau norma yang berkembang di masyarakat, populasi, opini publik, dan lain-lain
- C. *Governmental Sources* (sumber pemerintah) meliputi seluruh elemen dari struktur pemerintahan yang memberikan pertimbangan-pertimbangan akan pilihan *foreign policy* baik yang sifatnya memperluas atau

membatasi pilihan yang akan di ambil oleh para pembuat kebijakan, tentunya dalam lingkungan serta interaksi antar pihak didalam pemerintahan

- D. *Role Sources* (sumber peranan), role disini terkait dengan peranan atau status dari pemerintah sebagai pemnbuatan keputusan.
- E. *Individual sources* (sumber individu) meliputi nilai nilai dari seorang pemimpin atau pengambi keputusan sebagai ideologinya, pengalaman hiduonya, masa kecil, latar belakang pendidikan, segala sesuatu yang mempengaruhi persepsim pilihan dan respon atau reaksi dari seorang pengambilan keputusan dari pengambilan keputusan yang lain.

Rosenau juga mengatakan pendapat bahwa kebijakan luar negeri merupakan sebuah upaya dan usaha pemerintah melalui segala sikap dan aktivitas dalam memperoleh keuntungan eksternalnya.Kebijakan ini ditunjukkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara dimasa mendatang.Ungkapan Rosenau ini sangat menarik untuk dikutip yang mengenai kebijakan luar negeri yang dimiliki landasan atau konsep dasar dalam menjalankan hubungan negaranya dengan kejadian dilingkungan eksternalnya.(E ugene, 2003 hal98):

Kebijakan luar negeri memiliki tiga konsep dalam menjelaskan hubungan antara suatu negara dengan kejadian dan situasi diluar negaranya, yaitu:

1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*) politik luar negeri sebagai sekumpulan orientasi merupakan pedoman bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi situasi eksternal yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan berdasarkan orintasi tersebut , orientasi ini terdiri dari persepsi, sikap dan nilai nilai.
2. Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitments to and plan for action*), kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen kongkrit yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orintasi kebijakan luar negeri.

3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behavior*) pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada pada tingkat yang lebih empiris yakni berupa langkah langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkungan eksternalnya.

Dari kedua pendapat yang tersebut diatas,yaitu: K J Holsti dan Rosenau, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa keputusan dalam pengambilan kebijakan luar negeri tidak akan pernah lepas dari faktor internal suatu negara, seperti faktor ekonomi, politik dalam negeri, sosial, pertahanan dan militer. Selain itu faktor eksternal juga tetap menjadi pertimbangan dalam pengambilan sebuah kebijakan luar negeri suatu negara dengan saling mengkondisikan antara faktor internal dan eksternal maka akan terbentuklah sebuah kebijakan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan nasional untuk mencapai tujuan negara masing masing.

### **1.6.1 Teori Kebijakan Pertahanan**

Kebijakan pertahanan dan kekuatan pertahanan pada hakikatnya bekerja untuk kepentingan bangsa atau negara (Laura 2006 hlm 30) Kebijakan pertahanan ditujukan untuk melindungi dan juga sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Kekuatan pertahanan, dalam prakteknya jika cerdas digunakan dan terlatih, bisa menjadi kekuatan utama untuk tujuan politik yang lebih luas dari negara.

Carl von Clausewitz menyatakan bahwa perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Bahkan ketika kita tidak terlibat dalam perang, pemerintah sebuah negara harus menyadari bahwa pilihan pertahanan akan memiliki konsekuensi politik; *“Carl von Clausewitz declared that war was a continuation of politics by other means. Even when we are not engaged in war, politicians should be aware that the defence choices they make will have political consequences”* (Laura, 2006 hlm 39). Dua pertanyaan Kunci dari Kebijakan Pertahanan adalah apa yang kita bela, dan mengapa kita mempertahankannya? Kebijakan Pertahanan ini ada karena adanya Kepentingan Nasional dalam Setiap negara, dimana menurut David Chuter

mengatakan bahwa pembentukan kebijakan nasional adalah kepentingan nasional yang menjadi Pelopor dari artikulasi Kebijakan luar negeri, keamanan dan pertahanan. dan ketika negara tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai kepentingan nasionalnya maka itu adalah suatu penyebab meningkatnya ketidakamanan.(Laura, 2006 hal 39)

Pada hakikatnya pemerintah dipilih untuk dapat menjaga dan mempertahankan dan membuat suatu sistem perumusan kebijakan pertahanan yang baik dan bagaimana implementasinya dan bagian dari kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan pertahanan dimana pemerintah mempertahankan kepentingan nasional negara tersebut. Dalam hal menjalankan tugasnya, pemerintah harus memiliki organisasi yang baik, karena negara dengan organisasi yang baik akan memiliki kebijakan pertahanan dengan baik pula, contohnya seperti kepolisian, layanan penjara, layanan bea cukai, pelayanan kesehatan, serta guru, petugas pemadam kebakaran, dan sejumlah spesialis dan PNS yang akan membantu mempertahankan dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan tersebut. Bentuk-bentuk kekuatan pertahanan suatu negara adalah sebagai berikut:

Badan eksekutif negara, badan ini dapat merumuskan dan mengubah kebijakan dalam tindakan praktis. Mereka juga akan memberikan saran atau masukan tentang pembuatan kebijakan dan bersama dengan badan lain seperti badan legislatif secara bersama-sama merumuskan dan menetapkan sebuah kebijakan pertahanan.(Laura, 2006 4 hlm 46) kebijakan pertahanan adalah suatu garis Hirarki di dalam kebijakan pemerintah suatu negara, Hirarki ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. *Government Policy*/Kebijakan Pemerintah: kebijakan ini bersifat Umum.
  - a. *Foreign and Interior Policy*/Kebijakan Luar Negeri dan dalam Negeri: pembagian dua arah kebijakan tersebut.
2. *Security Policy*/Kebijakan Keamanan: diantaranya (Hubungan Politik-Militer dengantetanggadan lain-lain, Kebijakanterhadaporganisasi-organisasi regional dan PBB, prioritas Intelijen, Kontrol Senjata, non-

proliferasi dan rezim perjanjian, Penjaga Perdamaian dan partisipasi dalam operasi multinasional).

3. *Defense Policy*/Kebijakan Pertahanan: dari Kebijakan Keamanan inilah lahir kebijakan Pertahanan. Yang dapat diartikan bahwa suatu Keamanan yang ingin dicapai maka Negara membutuhkan Pertahanan dalam memproteksi kepentingan nasionalnya. Dan ini menjadi Hirarki yang sederhana tapi bermanfaat.

Kebijakan pertahanan seperti yang digambarkan di atas bersifat umum dan tidak berdiri sendiri seperti yang digambarkan dalam hirarki di atas. Kebijakan pertahanan merupakan kolaborasi dari kebijakan-kebijakan lain yang dapat mendukung terciptanya keamanan dan kedamaian bagi sebuah negara. Selain itu kebijakan pertahanan erat kaitannya dengan kebijakan luar negeri, karena setiap kebijakan pertahanan yang dikeluarkan oleh sebuah negara pasti berdampak pada dunia internasional serta respon internasional baik aktor negara maupun non negara. Seperti yang dilakukan oleh Rusia dengan China, menjalin kerjasama militer yang bertujuan untuk mempertahankan negaranya dari ancaman negara lain.

## I.7 Alur pemikiran



## I.8 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang pada umumnya menekankan terhadap kata-kata kunci dan bukan pada kuantifikasi dalam kumpulan serta analisis data. Sifat dari penelitian kualitatif adalah induktif, konstruksionis, serta interpretif meskipun penelitian kualitatif tidak selalu memasukan ketiga unsur tersebut. (Alan, 2004 hlm 266) Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai masalah yang diangkat sesuai dengan fokus penulis dalam penelitian ini yaitu tentang faktor apa yang melatarbelakangi Rusia meningkatkan kerjasama dengan China pasca *reverse engineering* tahun 2013.

### I.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif. Dimana dengan jenis penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Rusia dengan China dalam bidang ekspor persenjataan militer serta faktor faktor apa saja yang menjadi pendorong Rusia meningkatkan kerjasama militer dengan China Selain itu, kenapa rusia tetap menjalankan kerjasama dengan China padahal china telah mengcopy illegal “*reverse engineering*” produk senjata Rusia.

### **I.8.2 Jenis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Dimana data primer didapat melalui dokumen pemerintah Rusia yang di keluarkan oleh kementerian terkait. Sedangkan data sekunder didapat melalui observasi pustaka dari buku-buku jurnal-jurnal dan artikel-artikel ilmiah yang terkait dengan kasus yang diteliti. Selain itu, data sekunder juga didapat melalui pencarian dari portal-portal berita, baik melalui media cetak ,aupun media elektronik.

### **I.8.3 Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan pemaparan diatas, data primer didapat melalui dokumen dokumen negara yang dikeluarkan oleh pemerintah Rusia melalui kementerian yang terkait, seperti Kementerian Pertahanan Israel dan juga Kementerian Ekonomi rusia . sedangkan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan atau *library research* yang dilakukan oleh penulis di beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan FISIP UPN “Veteran” Jakarta, Perpustakaan Pusat UPN “Veteran” Jakarta, Perpustakaan Hubungan Internasional FISIP UI Depok, Perpustakaan Pusat UI Depok, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Balitbang Kementerian Pertahanan RI, dan juga Perpustakaan Kementerian Pertahanan RI. Selain dengan studi literatur, penulis juga melakukan studi online atau *online research* dengan mengakses mengakses situs-situs berita yang terkait dengan kasus yang sedang diteliti oleh penulis.

### **I.8.4 Teknik Analisa Data**

Dalam melakukan penelitian ini, data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dan dianalisa oleh penulis dengan menggunakan teori dan konsep yang telah dipaparkan diatas. Dimana teori dan konsep tersebut dipakai sebagai alat analisa dalam melakukan penelitian mengenai kerjasama keamanan rusia dengan china.

## **I.9 Sistem pembabakan**

Untuk melihat koherensi antar bab dalam skripsi ini, maka dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab serta beberapa sub bab. Keempat bab tersebut yaitu:

### **I. Pendahuluan**

Dalam Bab I ini akan membahas latar belakang masalah yang menjadi topik skripsi ini yang dilihat dari sudut pandang studi Hubungan Internasional dan sejarah awal hubungan kerjasama militer Rusia dengan China

### **II. Kerjasama militer Rusia dengan China pada masa *reverse engineering***

Dalam BAB II ini akan membahas kerjasama yang dilakukan oleh rusia dengan china berfokus pada bidang persenjataan dan dijelaskan bagaimana perjalanan kerjasama kedua negara Rusia dengan China pada masa *reverse engineering*

### **III. Faktor yang menyebabkan Rusia meningkatkan kerjasama militer dengan China pasca *reverse engineering 2013***

Dalam BAB III ini akan membahas faktor faktor apa saja yang melatarberlakangi Rusia meningkatkan kerjasama dengan China pasca *reverse engineering*

### **IV. Penutup**

Bab IV ini berisi tentang kesimpulan penulis dalam pokok-pokok penelitian ini, selain itu di bab ini juga ada saran dari penulis terkait kasus yang di teliti ini.

